

**DAFTAR BUKU SETDA BREBES BAGIAN HUKUM  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

<b>N O</b>	<b>KODE</b>	<b>TAHUN PENERBI T</b>	<b>NAMA BUKU</b>	<b>LEMAR I</b>	<b>BARI S</b>	<b>JUMLA H</b>	<b>PENERBI T</b>
1	1.1	2007	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2007
2	2.1	2007	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2007
3	3.1	2007	Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2007
4	4.1	2009	Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
5	4.1	2009	Undang-undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009

			Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
6	6.1	2009	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
7	7.1	2008	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	5	1	1	Setda Kabupaten Blora Tahun 2008
8	8.1	2008	Undang-Undang dibidang Perhubungan Tahun 2008	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2008
9	9.1	2008	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2008
10	10.1	2008	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2008

			Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah				
11	11.1	2009	4 Undang-Undang Tahun 2009	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
12	12.1	2009	4 Undang-Undang Tahun 2009	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
13	13.1	2009	5 Undang-Undang Tahun 2009	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jaakarta 2009
14	14.1	2010	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30&38 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan dan Pos	5	1	1	CV. Novindo Pusataka Mandiri, Jakarta 2010
15	15.1	2011	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2011
16	16.1	2011	Undang-Undang Nomor 5Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik	5	1	2	CV. Eko Jaya, Jakarta 2011
17	17.1	2011	Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Pengawas	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta - 2011

			Pemerrintah				
18	18.1	2011	3 Undang-Undang Tahun 2011	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2011
19	19.1	2011	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia 2011
20	20.1	2012	Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasian	5	1	2	CV. Eko Jaya, Jakarta 2012
21	21.1	2012	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2012
22	22.1	2012	3 Undang-Undang Pembangunan	5	1	2	CV. Eko Jaya, Jakarta

							2012
23	23.1	2013	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013	5	1	1	BP. Cipta Karya Jakarta 2013
24	24.1	2013	Sistem Peradilan Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Perpes No.33 Tahun 2012)	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia 2013
25	25.1	2004	Katalog Peraturan Pemerintah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Tahun 1945 s.d 2004 dengan Status/Aspek Legalitasnya	5	1	1	Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 2004
26	26.1	2008	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan	5	1	1	CV.Eko Jaya, Jakarta 2008
27	27.1	2005	Peraturan Pemerintah Republik	5	1	1	Departemen Dalam Negeri

			Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja				Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum 2005
28	28.1	2008	Katalog Peraturan Pemerintah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Tahun 1945 s.d 2008 dengan Staus/Aspek Legalitasnya	5	1	1	Biro Hukum Sekretariat Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2008
29	29.1	2010	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
30	30.1	2010	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penerbitan & Pendayagunaan Tanah Terlantar	5	1	1	CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta - 2010
31	31.1	2010	Peraturan Pemerintah Republik	5	1	1	CV. Mini Jaya Abadi

			Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana				Jakarta
32	32.1	2010	Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Daerah Perwakilan Rakyat Daerah	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
33	33.1	2010	Perturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (TATIB DPRD) & dan Permendagri No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ffungsi	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia 2010

			Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan				
34	34.1	2010	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	5	1	1	BP. Cipta Jaya-Jakarta
35	35.1	2010	Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Kamal (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta - 2010



			dan Peran Masyarakat dan Jasa Kontruksi				
36	36.1	2010	Himpunan Pemerintah Republik Indonesia dan Mentri Dalam Negri Tentang Desa, Kelurahan, Kecamatan	5	1	2	CV. Cipta Media Indonesia - 2010
37	37.1	2010	Peraturan Pemerintah Tentang Pilkada dan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta - 2010
38	38.1	2013	Peraturan Pemerintah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Publik (PP.No.96Tahun2012) dan Refomasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta - 2013
39	39.1	2011	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah	5	1	1	CV. Novindo Pustaka

			Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana				Mandiri Jakarta - 2011
40	40.1	2008	Katalog Undang-Undang Pemerintahan Negara Republik Indonesia Sejak Tahun 1945 s.d 2008 Dengan Status/Aspek Legalitas	5	1	1	Biro Hukum Sekretariat Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2008
41	41.1	2010	Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta
42	42.1	2011	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (PP No 65 TH	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta - 2011

			2010)				
43	43.1	2011	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia &Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana	5	1	2	CV. Eko Jaya, Jakarta 2011
44	44.1	2011	Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 (PMK No.84/PMK.02/20 11) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2011

45	45.1	2012	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2012
46	46.1	2012	Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negri Sipil dan Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Sesuai Ijasah PNS	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta - 2012
47	47.1	2012	Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta- 2012

			No. 43 TH 2009 Tentang Kearsiapan dan Himpunan Peraturan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap				
48	48.1	2013	Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan	5	1	2	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta- 2013
49	49.1	2011	Standar Dokumen Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2010	55	1	1	Cv. Mini jaya Abadi Jakarta 2011

50	50.1	2013	Peraturan Pemerintah Tentang Petunjuk Pelaksanaan dalam Pelayanan Publik (PP.No.96 Tahun 2012) dan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta - 2013

51	51.1	2008	Katalog Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden Pemerintahan NKRI sejak Tahun 1946 s.d. 2008 dengan Status/Aspek Legalitas	5	1	1	Biro Hukum Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
52	52.1	2010	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
53	53.1	2010	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
54	54.1	2012	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	1	1	BP. Cipta Karya-Jakarta 2012
55	55.1	2013	PerPres No. 71 Tahun 2012	5	1	1	CV. Cipta Media

			tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD dan APBN				Indonesia Jakarta- 2013
--	--	--	---	--	--	--	-------------------------------

56	56.1	2006	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2006
57	57.1	2008	Katalog Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Pemerintahan NKRI sejak Tahun 1946 s.d. 2008 dengan Status/Aspek Legalitas	5	1	1	Biro Hukum Sekretari at Jenderal- Departem en Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008
58	58.1	2008	Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 15	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2008



59	59.1	2007	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	CV. Cipta Jaya-Jakarta
60	60.1	2011	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	5	1	1	CV. Cipta Jaya-Jakarta
61	61.1	2010	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dan Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2010

			(Satpl PP)				
62	62.1	2010	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas	5	1	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2010
63	63.1	2009	Peraturan Menteri keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Penyusunan dan Penelahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga dan Penyusunan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
64	64.1	2009	Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 17	5	1	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
65	65.1	2009	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara	5	1	1	BP. Prestindo Mediatama 2009

			Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
66	66.1	2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	1	1	CV.EkoJaya, Jakarta 2008
67	67.1	2011	Peraturan MENDAGRI Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan MENDAGRI Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010	5	2	1	CV. Cipta Media Indonesia, Jakarta 2011
68	68.1	2011	Peraturan MENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MENDAGRI nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	5	2	1	CV.Cipta Jaya, Jakarta
69	69.1	2011	Peraturan MENDAGRI Nomor 54 tahun 2010 Tentang	5	2	1	CV.Cipta Media Indonesia, Jakarta

			Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian , dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah				
70	70.1	2011	PERMEDAGRI NO.53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum (Undang-Undang No. Tahun 2011)	5	2	2	CV.Cipta Media Indonesia ,Jakarta 2011
71	71.1	2011	PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011	5	2	1	CV.Cipta Media Indonesia ,Jakarta
72	72.1	2011	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun	5	2	1	CV.Cipta Media Indonesia Jakarta 2011

73	73.1	2012	Peraturan Menteri Dalam Negeri No .37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2013				
----	------	------	--	--	--	--	--

74	74.1	2010	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	5	2	1	CV.Eko Jaya,Jakarta 2010
75	75.1	2011	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	2	2	CV.Cipta Media Indonesia Jakarta-2010
76	76.1	2013	Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan	5	2	1	Bagian Hukum Setda Kabupaten

			Pengelolaan Lingkungan Hidup di				Pemalang Tahun 2013
77	77.1	2013	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang	5	2	1	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
78	78.1	2013	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	5	2	1	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2013
79	79.1	2013	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Nomor 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat	5	2	1	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2013
80	80.1	2013	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomo 11 Tahun 2012 Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman	5	2	1	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang Tahun

			Beralkohol				2013
81	81.1	2013	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga	5	2	1	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2013
82	82.1	2012	Himpunan Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012	5	2	1	Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo
83	83.1	2013	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Pemberian air susu Ibu di Kabupaten Pemalang	5	2	1	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2013
84	84.1	2013	Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana	5	2	1	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2013
85	85.1	2013	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan	5	2	1	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang

			Penanggulangan Bencana				Tahun 2013
86	86.1	2013	Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan	5	2	1	CV.Eko Jaya ,Jakarta 2013
87	87.1	2013	Peraturan Perundang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Pembendaharaan Negara & Pemeriksaan Pengelolaan Dan	5	2	1	CV.Eko Jaya, Jakarta 2013
88	88.1	2013	Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	5	2	1	Pusat, Jakarta ,2013
89	89.1	2013	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	5	2	1	Pusat,Jak arta ,2013

90	90.1	2008	Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 16	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2008
91	91.1	2008	Peraturan Praktis	5	2	1	CV. Eko



			Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 14				Jaya, Jakarta 2008
92	92.1	2009	Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
93	93.1	2009	Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2008-2009 Edisi Lengkap Buku I	5	2	1	Pusat, Jakarta, 2009
94	94.1	2009	Himpuna Peraturan Kepegawaian Tahun 2008-2009 Edisi Lengkap Buku II	5	2	1	Pusat, Jakarta, 2009
95	95.1	2011	Petunjuk Pelaksanaan rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014	5	2	1	Sekretariat Panitia Ranham Nasional Jakarta, 2011
96	96.1	2011	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomoe 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014	5	2	1	Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011
97	97.1	2007	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan di Daerah Jilid XXIX	5	2	1	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

98	98.1	2006	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri Tahun 2006	5	2	1	Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri
99	99.1	2007	Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan Tahun 2007	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2007
100	100.1	2010	Himpunan Pedoman Peraturan Kepegawaian	5	2	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta-2010
101	101.1	2010	Pilihan Peraturan Keuangan Negara Tahun 2010	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
102	102.1	2010	Peraturan Pokok-Pokok Bidang Pertanahan	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
103	103.1	2010	Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 18	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
104	104.1	2010	Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan dinas, dan Pensiunan 2010	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
105	105.1	2013	Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2013
106	106.1	2013	Himpunan Peraturan	5	2	2	CV. Cipta

6			tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota dan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Media Indonesia Jakarta-2013
107	107.1	2013	Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional & Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2013
108	108.1	2013	Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Keuangan Negara	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2013
109	109.1	2012	Himpunan Peraturan Dibidang Pertanahan/Agraria serta Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan tentang	5	2	1	CV. Cipta Media Indonesia-2012

			Rumah Susun				
110	110.1	2013	Himpunan Peraturan tentang Administrasi Kependudukan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	5	2	1	CV. Cipta Media Indonesia-2013

111	111.1	2008	Pelanggaran Hak Asasi Manusia	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2008
112	112.1	2009	Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
113	113.1	2009	Pedoman Pinjaman, Hibah Daerah dan Sistem Akuntansi Hibah	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
114	114.1	2009	Pedoman Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
115	115.1	2009	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (UU Nomor 52 Tahun 2009) & Administrasi Kependudukan Beserta Peraturan Pelaksanaannya	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
116	116.1	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU RI No. 32 Th.	5	2	1	CV. Duta Nusindo Semarang 2009

			2009)				
11 7	117. 1	2009	Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Beserta Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Layanan Umum	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
11 8	118. 1	2009	Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2009
11 9	119. 1	2010	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
12 0	120. 1	2010	Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja	5	2	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2010
12 1	121. 1	2010	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah	5	2	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2010
12 2	122. 1	2010	Pedoman Pembentukan	5	2	1	CV. Eko Jaya,

			Peraturan Perundang-Undangan & Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah				Jakarta 2010
123	123.1	2011	Penyelesaian Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik	5	3	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2011
124	124.1	2011	Pedoman Peraturan PemiluKada tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	5	3	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2011
127	127.1	2013	Peraturan KPU No.13 Th 2013 Perubahan Atas Peraturan Kpu NO.7 Th 2013 Tentang Pencalonan DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota &Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ Kota	5	3	1	CV. Cipta Media Indonesia, Jakarta 2013
128	128.	2014	Pedoman	5	3	1	Kemeteria

8	1		Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah Pertama Berprestasi tahun 2014				n Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidikan dan TenagaKependidikan Pendidikan dasar 2014
129	129.1	2014	Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru SMA/MA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2014	5	3	1	Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidikan dan TenagaKependidikan Pendidikan dasar 2015
13	130.	2014	Pedoman				Kemeteria

0	1		pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah Dasar Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2014				n Pendidika n dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidik dan TenagaKependidikan Pendidika n dasar 2015
131	131.1	2005	Badan Pokok Penyuluhan Hukum	5	3	1	Departemen Hukum Dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia 2005
123	123.1		Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	5	3	1	M, Yahya Harahap,SH.
133	133.1		Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP	5	3	1	M. Yahya Harahap , SH.



			Penyidikan dan				
134	134.1	2008	KUHP&KUHP	5	3	1	Rineka Cipta
135	135.1	2012	Himpunan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Buku-1	5	3	1	Bagian Hukum dan Setda Kabupaten Purbalingga 2012
136	136.2	2012	Himpunan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Buku-2	5	3	1	Bagian Hukum dan Setda Kabupaten Purbalingga 2012
137	137.1	2013	PP RI No .40 Th 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Th 2009 Tentang Narkotika	5	3		
138	138.1	2014	Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tentang Desa	5	3	2	
139	139.1		Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang RI Tentang Cara	5	2	1	
140	140.1		Pedoman Bagi Bendahara Pemerintah Sebagai Pemotong /Pemungut Pajak-Pajak Negara	5	3	1	
141	141.	2014	Permendagri No.1	5	3	2	

	1		Tahun 2014 Tentang Pembentukan Hukum Daerah				
14 2	142. 1	2014	PP RI NO.27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (PMK NO. 78/PMK-06/2014)	5	3	1	
14 3	143. 1		Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi RI Buku 1	5	3	1	
14 4	144. 1		Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi RI Buku 2	5	3	1	
14 5	145. 1	2011	Peraturan Meteri Dalam Negeri RI No.32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang Bersumber Dari APBD	5	3	1	

14 6	146. 1	2013	Peraturan Menteri dalam Negeri RI No.36 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah	5	3	2	
14 7	147. 1	2014	Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2014	5	3	1	
14 8	148. 1	2014	Peraturan Menteri Keuangan Dirjen Pajak tentang Perhitungan PemotonganPajak Penghasilan (PPH) 2014	5	3	1	
14 9	149. 1	2014	Peraturan Mendagri No.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Peraturan Mendagri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sisitem Informasi	5	3	2	
15 0	150. 1	2014	Peraturan Menteri Keuangan RI No.53 /PMK-02/2014	5	3	1	

			Tentang Standar Biaya Masukan Tahu Anggaran 2015 dan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggap Transfer Kedaerah (PMK No.183/				
15 1	151. 1	2011	Undang –Undang RI No. 1 Tahun2011 Tentang Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertahanan Tahun2011	5	3	1	
15 2	152. 1	2014	Undang-Undang RI No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur S N	5	3	2	
15 3	153. 1	2011	Undang –Undang RI No12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan	5	3	1	
15 4	154. 1	2013	Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2013 Tentang ketentuan Pelaksanaan Penilaian Kerja PNS dan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi	5	3	2	

15 5	155. 1	2012	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2012 Jilid 3156	5	3	1	
15 6	156. 1	2013	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2012 Jilid 4	5	3	2	
15 7	157. 1	2014	Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Pedoman APBD Tahun Anggaran 2015 dan Standar Prosedur Operasi Dalam rangka Pencairan Dana Pada Kantor Pelayanan	5	3	2	
15 8	158. 1	2004	Hukum acara perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan	5	3	1	
15 9	159. 1	2008	Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah & Hibah dan Bantuan Daerah	5	3	1	CV.Eko Jaya, Jakarta 2008
16 0	160. 1	2010	SAP PP RI No 71 Tahun 2010 Tentang SAP Beserta	5	3	1	Fokusindo Mandiri

			Lampiran dan Format Laporan				
16 1	161. 1	2013	Permendagri No.27 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	5	3	1	CV. Eko Jaya , Jakarta 2013
16 2	162. 1	2014	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	5	3	3	CV. Mini Jaya Abadi Jakarta 2014
16 3	163. 1	2014	Seri Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia	5	3	1	
16 4	164. 1	2014	Seri Peraturan Perundang- undangan republik Indonesia Bagian 2	5	3	1	
16 5	165. 1	2014	Undang-Undang Bantuan Hukum & Organisasi Kemasyarakatan	5	3	1	Fokusindo mandiri
16 6	166. 1	2006	KUHP&KUHP Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam	5	3	1	Fokusindo Mandiri
16 7	167. 1	1995	Kitab Undang- undang Hukum Perdata	5	3	1	Sinar Grafika

168	168.2	2012	Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat PNS	5	3	2	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2012
169	169.1	2012	PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD	5	3	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2012
170	170.2	2013	Sistem Peradilan Anak Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (PerPres No. 33 Tahun 2012)	5	3	2	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2013
171	171.2	2012	Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	5	3	2	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2012
172	172.2	2013	Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP NO. 63 Tahun 2008	5	3	2	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2013

			tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan				
17 3	173. 2	2013	Peraturan Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Pelayanan Publik (PP No. 96 Th 2012) dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5	3	2	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2013
17 4	174. 1	2013	Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (PMK No.78/PMK 06/2014)	5	3	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2013
17 5	175. 1	2013	Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS/ (Perkara BKN No. 7 Tahun 2013)	5	3	1	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2013
17 6	176. 2	2013	PerPres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan	5	3	2	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2013



			Untuk Kepentingan Umum dan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD dan APBN				
17 7	177. 2	2013	PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan PERMENDAGRI Daerah	5	3	2	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2013
17 8	178. 2	2013	Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	5	3	2	CV. Mini Jaya Abadi Jakarta-2013
17 9	179. 2	2014	Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)	5	3	2	CV. Cipta Media Indonesia Jakarta 2014
18 0	180. 1	2014	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2013 Nomor 1	5	3	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2014
18 1	181. 1	2014	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Nomor 2	5	3	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2014
18	182.	2014	Kamus Hukum	5	3	1	Rineka

2	1						Cipta
183	183.1	2013	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 Jilid I	5	3	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2013
184	184.1	2013	Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 Jilid II	5	3	1	CV. Eko Jaya, Jakarta 2013
185	185.1	2015	PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015	5	3	1	CV. Mini Jaya Abadi Jakarta-2015
186	186.1	2014	PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	5	3	1	CV. Mini Jaya Abadi Jakarta-2014
187	187.1	2014	Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	5	3	1	CV. Mini Jaya Abadi Jakarta-2014
188	188.	2015	Peraturan Presiden	5	3	1	CV. Eko

8	1		No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				Jaya, Jakarta 2015
---	---	--	---	--	--	--	--------------------------

**DAFTAR BUKU BAGIAN SETDA  
BREBES BAGIAN HUKUM  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA**